

“POLITICS” DAN “POLITICKING”

Oleh Nurcholish Madjid

Adalah menarik sekali mencatat apa yang dikatakan oleh Presiden Soeharto dalam amanatnya kepada Musyawarah Nasional Golkar di Surabaya. Dalam amanat itu antara lain dipesankan dengan tegas agar Golkar dan semua rakyat tidak mengadakan “jor-joran manipolis’ seperti zaman Orde Lama.

Memang sebagai ciri masa lalu itu, jor-joran manipolis sangat menonjol. Tetapi meskipun suasana manipolis itu mempunyai konsistensi nasakomisme dengan inti kekuatan-kekuatan politik pokok PNI, NU dan PKI, tidaklah berarti bahwa suasana persaingan yang kurang sehat itu hanya terdapat di antara ketiga partai itu saja. Sebetulnya seluruh rakyat Indonesia terseret ke dalam lumpur manipolisme itu hampir tanpa kecuali. Ada sekelompok orang yang sering terdengar membanggakan diri sebagai bebas dari dosa manipol itu. Tetapi bukan karena mereka mampu secara efektif mengadakan perlawanan kepadanya, melainkan semata-mata karena tidak ikut-ikut, alias lepas tangan sama sekali dari tanggung jawab sosial, menempuh politik pengasingan diri atau “*uzlah*”. Berkenaan dengan itu, ada baiknya diingat suatu kata hikmah (dalam bahasa Inggris), “*To avoid criticism say nothing, do nothing and be nothing*”

Termasuk yang terlibat dalam dosa manipol itu ialah ABRI sendiri. Ya, betul-betul dapat dipertanyakan, siapakah sebenarnya dalam masa kejayaan Bung Karno itu, jika tidak hendak memilih jalan isolasi, yang dapat membebaskan dirinya dari semangat Soekarno, termasuk di dalamnya ideologi manipol? Hanya saja,

dalam hal ABRI, terdapat suatu *credit point* yang patut dicatat, yaitu bahwa ABRI kemudian berhasil muncul sebagai kekuatan pengimbang bagi PKI yang semakin mendominasi suasana politik nasional. Dominasi PKI itu berkat keberhasilannya memborong jargon-jargon politik manipol dan pengisian program-programnya. Dalam tarik tambang perebutan jargon itu, orang masih ingat akan perjuangan antara para penganut “Nasakom Bersatu” dan “Nasakom Jiwaku”. PKI adalah penganut jargon pertama. Sebab ia memberikan pengertian bahwa Nasakom adalah terdiri dari berbagai kekuatan dan paham politik dalam masyarakat Indonesia yang harus disatupadukan. Masing-masing kelompok atau pribadi berhak atas salah satu dari tiga semangat pokok: apakah nasionalisme, keagamaan atau komunisme. Memadukan antara ketiga unsur pokok semangat itu dalam satu kelompok atau pribadi (apalagi!) adalah tidak dibenarkan. Tentu saja pengertian ini sesuai dengan kepentingan PKI dan menguntungkannya. Sebab dengan begitu, bagi mereka, berarti terpeliharanya kemurnian ideologi komunisme, tanpa adanya keharusan bagi mereka untuk berkompromi dengan paham ketuhanan atau nasionalisme. Orang-orang komunis begitu yakin akan keunggulan partai dan ideologinya, sehingga bagi mereka kemenangan terakhir juga hanya merupakan soal waktu saja.

Tidaklah demikian halnya dengan ABRI yang memelopori jargon “Nasakom Jiwaku”. Menurut dalil itu, Nasakomisme adalah suatu semangat atau paham yang tunggal, yang di dalamnya terdapat perpaduan antara unsur-unsur positif dalam nasionalisme, keagamaan dan komunisme. Seorang pribadi mungkin saja — dan menurut ukuran saat itu malah diharuskan — menggabungkan dalam dirinya semangat sebagai nasionalis, agamawan, dan sosialis! Contoh pribadi serupa itu ialah Bung Karno sendiri. Ia sering mengaku sebagai sekaligus nasionalis, Muslim, dan Marxis.

Agaknya benar juga suatu analisis bahwa jika PKI menggunakan jargon “Nasakom Bersatu” untuk keuntungan dirinya sendiri, maka ABRI mengajukan dalil “Nasakom Jiwaku” adalah semata-

mata untuk kerugian PKI (baca: bukan langsung keuntungan ABRI). Sebab dengan begitu berarti memaksa PKI untuk mengkompromikan ideologi Marxisme-Leninismenya dengan unsur-unsur paham nasionalisme dan keagamaan. Jika diikuti secara konsekuen, maka berarti PKI kehilangan *raison d’être*-nya. Sebab komunisme sebagai paham yang berdiri sendiri tidak dibenarkan.

Sekarang sudah sejak beberapa tahun kekuasaan Bung Karno runtuh. Jika dualisme PKI-ABRI di zaman Orla itu dijadikan ukuran, maka keadaan sekarang dapatlah dikatakan sebagai kemenangan ABRI dan kekalahan PKI. Mungkin memang tidak lain dari kenyataan itu! Tetapi mengapa hal itu tidak secara langsung berarti kemenangan jargon “Nasakom Jiwaku” dan kekalahan “Nasakom Bersatu?” Seandainya demikian tentunya kita sekarang adalah penganut “Nasakom Jiwaku” dan menolak “Nasakom Bersatu”. Tetapi kenyataannya justru segala sesuatu yang berbau masa lampau itu kita usahakan penghapusannya sama sekali, bahkan begitu jauh sehingga yang berbau Bung Karno (Soekarnoisme) pun kita singkirkan.

Hal itu dapat diterangkan jika kita mencoba menggunakan perbedaan pengertian antara “*politics*” dan “*politicking*” (kedua istilah ini kita biarkan dulu dalam bunyi asli Inggrisnya). “*Politics*” lebih banyak bersangkutan dengan segi ilmu pengetahuan. Yaitu ilmu pengetahuan tentang bagaimana mengatur kehidupan sosial manusia, khususnya yang berkaitan dengan masalah kekuasaan dan pemerintahan. Sebagai ilmu, tentu saja “*politics*” adalah bermanfaat. Dan termasuk ke dalam “*politics*” itu ialah penentuan sikap dalam memilih paham atau ideologi politik yang hendak secara sungguh-sungguh dilaksanakan dalam masyarakat. Pilihan dilakukan karena keyakinan akan kebenaran ideologi yang bersangkutan. Jadi bukan semata-mata sebagai perantara untuk mencapai tujuan di luarnya.

Sebaliknya, “*politicking*” adalah permainan politik. Dalam perkataan itu terselip pengertian “ngakali” orang lain atau “membodohi-

nya” sehingga dalam rangka perebutan kekuasaan itu orang atau golongan lain itu lebih mudah dikalahkan. Maka dengan sendirinya tema-tema yang muncul dalam rangka “*politicking*” tidak pernah menjadi tujuan pada dirinya sendiri. Ia hanya perantara untuk mencapai tujuan lain, tidak peduli apakah obyektif atau subyektif. Dari sudut kenyataan bahwa setelah ABRI “manggung” atas PKI sekarang ini, tema “Nasakom Jiwaku” tidak dipertahankan, malahan dikubur dalam-dalam, maka dapat dikatakan dengan cukup beralasan bahwa pengajuan tema itu di masa Orla adalah dalam rangka “*politicking*”. Tujuan sebenarnya bukanlah untuk membetulkan pengertian yang salah tentang Nasakom itu dan kemudian mempertahankannya, malahan justru untuk dapat menghancurkannya demi kemenangan Pancasila (sesuai dengan keresmian-keresmian yang dinyatakan ke luar).

Bagaimana dengan “Nasakom Bersatu” bagi PKI? Itu pun kiranya adalah “*politicking*”. Sebab seandainya PKI menang, tidak ada tanda-tanda bahwa ia akan masih berjalan di atas Nasakomisme. Justru sebaliknya cukup kuat tanda-tanda bahwa komunisme akan merupakan ideologi tunggal dalam negara yang dikuasai orang-orang PKI, dengan tidak ada toleransi terhadap paham-paham yang lain, termasuk dua unsur Nasakomisme yang lain yaitu nasionalisme dan keagamaan (lebih-lebih!).

Sekarang, sekalipun kita mencoba membedakan pengertian “*politics*” dan “*politicldng*”, tetapi apakah dalam praktik memang terdapat kegiatan “*politics*” yang lepas bebas dari usaha-usaha “*politicking*”? Agaknya jawaban yang realistis akan mengatakan “tidak terdapat”. Sebab jika “*politics*” merupakan tujuan dan keharusan (ingat: *zoon politicon*), agaknya “*politicking*” adalah cara yang umum dipakai untuk mencapai tujuan itu. “*Politics*” ABRI adalah Pancasila, tetapi untuk kemenangan Pancasila itu atas Nasakom yang didominasi PKI dimunculkanlah jargon “Nasakom Jiwaku”. Dan “*politics*” PKI adalah Marxisme-Leninisme, dan untuk memenangkannya, partai itu memelopori ide tentang Nasakom.

Dan, kembali sejenak kepada apa yang disinggung pada permulaan tulisan ini, Golkar pun tidak luput dari “*politicking*” ini. Sementara tema Golkar adalah depolitisasi, tetapi justru cara-cara yang dijalankan untuk mewujudkan tema itu ialah serangkaian kegiatan yang semakin memolitikkan masyarakat. Suasana yang serba-politik di masa Orla yang hendak diberantas oleh Golkar ialah apa yang dikatakan presiden sebagai “jor-joran manipolis” tadi. Intinya ialah “*macht vorming*” dan “*macht aanwending*”. Tetapi hendak dikatakan sebagai apakah suasana yang amat kuat menandai wujud Golkar berupa kegiatan mengorganisasikan hampir semua sektor kehidupan dan sosial dalam masyarakat seperti — ambil contoh yang paling ekstrem — “Himpunan Putra-Putri Haji Indonesia” atau “HIPPHI” itu? Jelas adalah termasuk kategori “*macht vorming*” dan kemudian “*macht aanwending*” itu. Dan jelas pula adalah jenis jor-joran (bukan manipolis memang, tapi pasti politis!). ABRI “membela” Nasakom melalui “Nasakom Jiwaku” dapat dibenarkan, sebab berakhir dengan kekalahan Nasakomisme sendiri dan kemenangan Pancasila. Mungkin juga “*macht vorming*” oleh Golkar dapat dibenarkan karena akan digunakan untuk justru menghilangkan suasana “*macht vorming*” itu sendiri. Tetapi, kalau begitu, kapankah, atau apakah memang tidak mungkin kita bebas dari lumpur semangat “tujuan menghalalkan cara” yang konon diperoleh dari hasil pemikiran Nicollo Machiavelli? [✧]